



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11 Tahun 2011
TANGGAL : 6 Juni 2011

**PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*
(*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY-AEC*) TAHUN 2011**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
A. MENUJU PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI					
1. Peningkatan Daya Saing dan Pemanfaatan Komitmen AEC	1) Peningkatan daya saing nasional	Laporan pertumbuhan nilai/volume ekspor Indonesia ke ASEAN	Desember 2011	Tercapainya daya saing dan pemanfaatan komitmen yang optimal	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan
	2) Penataan lahan dan kawasan industri	Peta panduan penataan lahan kawasan industri	Desember 2011		Menteri Perindustrian
	3) Pembenahan infrastruktur dan energi	Peta panduan pembenahan infrastruktur dan energi	Desember 2011		Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
	4) Pembenahan Pemberian insentif (pajak dan non pajak)	Pedoman pemberian insentif (pajak dan non pajak)	Desember 2011		Menteri Keuangan
	5) Pembenahan sistem logistik, antara lain melalui:				

a. Penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	a. Penyusunan Cetak Biru Sistem Distribusi Nasional	Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Cetak Biru Sistem Distribusi Nasional	Desember 2011		Menteri Perdagangan
	b. Pengembangan pusat-pusat distribusi di Kawasan Timur Indonesia	Revitalisasi 1 (satu) Pusat Distribusi Regional di Kawasan Timur Indonesia.	Desember 2011		Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan: ~ Menteri Perdagangan ~ Menteri Perhubungan ~ Menteri Pekerjaan Umum ~ Menteri Dalam Negeri ~ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas	1) Melakukan <i>assessment</i> terkait dengan penghapusan hambatan non-tarif sesuai dengan daftar yang disampaikan oleh Sekretariat ASEAN di sektor:				
	a. Perdagangan untuk 7 (tujuh) sektor prioritas barang	Hasil <i>assessment</i> mengenai penghapusan hambatan non tarif di sektor Perdagangan	Desember 2011	Terpenuhinya komitmen AEC terkait dengan hambatan non-tarif.	Menteri Perdagangan

b. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	b. Industri	Hasil <i>assesment</i> mengenai penghapusan hambatan non tarif di sektor industri	Desember 2011		Menteri Perindustrian
	c. Obat dan Makanan	Hasil <i>assesment</i> mengenai hambatan non tarif di sektor obat dan makanan	Desember 2011		Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
	d. Pertanian	Hasil <i>assesment</i> mengenai penghapusan hambatan non tarif di sektor pertanian	Desember 2011		Menteri Pertanian
	e. Energi	Hasil <i>assesment</i> mengenai penghapusan hambatan non tarif di sektor energi	Desember 2011		Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
	2) Menambah jaringan sistem otomasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) secara <i>online</i> di 57 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)	Otomasi SKA secara <i>online</i> menjadi 85 IPSKA	Desember 2011	Pemenuhan komitmen AEC mengenai <i>Rules of Origin</i> (ROO)	Menteri Perdagangan
	3) Mempersiapkan <i>database</i> penerbitan SKA	<i>Database</i> SKA di 85 IPSKA	Desember 2011		Menteri Perdagangan
	4) Menerapkan standar <i>United Nation - electronic Document</i> pertukaran data SKA antar Negara ASEAN melalui ASEAN <i>Single Window</i> (ASW)	SKA sesuai dengan standar <i>United Nation - Electronic Document</i>	Desember 2011		Menteri Perdagangan

5) Mempersiapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	5) Mempersiapkan <i>database</i> eksportir manufaktur yang memenuhi persyaratan untuk penerapan <i>Self Certification</i> -(SC) 2012	<i>Database</i> 3600 eksportir	Desember 2011	Pemenuhan komitmen AEC mengenai fasilitasi perdagangan	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan
	6) Menyiapkan desain <i>National Trade Repository</i> (NTR)	Desain NTR	Desember 2011		Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan
	7) Menerapkan ketentuan ASEAN <i>Policy Guidelines on Standards and Conformance</i>	Sistem Standarisasi Nasional yang sesuai dengan ASEAN <i>Policy Guidelines on Standards and Conformance</i>	Desember 2011	Pemenuhan komitmen AEC di bidang standar dan kesesuaian (<i>standards and conformance</i>)	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: ~ Menteri Pertanian ~ Menteri Perindustrian ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ~ Menteri Kesehatan ~ Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ~ Kepala Badan Standarisasi Nasional
	8) Menerapkan <i>Standards, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedures</i> (STRACAP) dalam ASEAN <i>Trade in Good Agreement</i> (ATIGA)	Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan ketentuan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dalam ATIGA	Desember 2011		
	9) Pelaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri pengemasan nasional agar mampu memenuhi ketentuan <i>the ASEAN Common Requirements for Pre-packaged Products</i> (ACRPP)	a. <i>Workshop</i> nasional b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>)	September 2011		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	10) Menerapkan ketentuan ACRPP	Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian	Desember 2011		Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian
	11) Pelaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri kosmetik nasional, khususnya UMKM agar mampu memenuhi ASEAN <i>Cosmetic Directives</i> (ACD)	a. <i>Workshop</i> nasional b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>) untuk UMKM nasional di sektor kosmetik	September 2011		Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan: - Menteri Kesehatan - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
	12) Menerapkan ketentuan ACD dan penguatan infrastruktur dan kemampuan industri kosmetika nasional khususnya UKM	Transposisi ACD ke dalam Peraturan Nasional yaitu: a. Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 00.05.42.1018 Tahun 2008 tentang Bahan Kosmetika	Desember 2011		Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: - Menteri Kesehatan - Menteri Perindustrian - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan - Kepala Badan Standarisasi Nasional
		b. Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 00.05.42.2995 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika	Juli 2011		

c. Penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 6 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Bentuk dan Jenis Sediaan yang Dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Izin Produksi Golongan B	Juli 2011		
		d. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Kosmetika	Desember 2011		
		e. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Monitoring Efek Samping Kosmetika	Desember 2011		
		f. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika	Desember 2011		

g. Penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 7 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		g. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Metode Analisis Kosmetika ASEAN	Juli 2011		
		h. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Cemarkan Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika	Juli 2011		
	13) Pelaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri elektronika dan peralatan kelistrikan nasional agar mampu memenuhi ketentuan Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika (<i>Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime</i>)	a. <i>Workshop</i> Nasional b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>)	September 2011		Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan: - Menteri Perdagangan - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral - Kepala Badan Standarisasi Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 8 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	14) Menerapkan ketentuan ASEAN <i>Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime</i>	a. Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2011 tentang Tatacara Pengakuan terhadap Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronik dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di Negara-negara ASEAN b. Pedoman Standardisasi Nasional terkait sektor elektronika dan peralatan kelistrikan	Desember 2011		Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan: ~ Menteri Perdagangan ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ~ Kepala Badan Standardisasi Nasional
	15) Pelaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri farmasi nasional agar mampu memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan ketentuan ASEAN <i>Common Technical Dossier</i> (ACTD)	a. <i>Workshop</i> nasional b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>)	Desember 2011 - berlanjut		Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kesehatan ~ Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ~ Kepala Badan Standardisasi Nasional

16) Menerapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 9 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	16) Menerapkan ketentuan ACTD dan ASEAN <i>Sectoral Mutual Recognition Arrangement for the Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Product</i>	Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 00.05.3.1950 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat	Desember 2011		Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kesehatan ~ Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ~ Kepala Badan Standarisasi Nasional
	17) Pelaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri pangan nasional agar mampu memenuhi ASEAN <i>Common Food Control Requirements</i> yang terdiri dari: ~ ASEAN <i>Common Principles for Food Control Systems</i> ; ~ ASEAN <i>Common Principles and Requirements for the Labelling of Pre-packaged Food</i> ; dan ~ ASEAN <i>Common Principles and Requirements for Food Hygiene</i>	a. <i>Workshop</i> nasional b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>)	Desember 2011 - berlanjut		Menteri Pertanian berkoordinasi dengan: ~ Menteri Perdagangan ~ Menteri Kesehatan ~ Menteri Perindustrian ~ Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ~ Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ~ Kepala Badan Standarisasi Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 10 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	18) Partisipasi Indonesia ke dalam ASEAN <i>Rapid Alert System for Food and Feed</i> (ARASFF)	a. <i>Workshop</i> dan penguatan infrastruktur nasional b. Sistem teknologi informasi dan Pedoman untuk <i>Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed</i> (INRASFF) c. Pelaksanaan <i>pilot project</i> INRASFF	Desember 2011 - berlanjut		Menteri Pertanian berkoordinasi dengan: ~ Menteri Perdagangan ~ Menteri Kesehatan ~ Menteri Perindustrian ~ Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ~ Menteri Kelautan dan Perikanan
	19) Pelaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri peralatan kesehatan nasional agar mampu memenuhi ASEAN <i>Medical Directives</i> .	a. <i>Workshop</i> nasional. b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>)	September 2011		Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan: ~ Menteri Perdagangan ~ Menteri Perindustrian ~ Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ~ Kepala Badan Standarisasi Nasional
	20) Pelaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri obat tradisional dan suplemen kesehatan nasional agar mampu memenuhi ketentuan ASEAN <i>Model for Traditional Medicines and Health Supplements</i>	a. <i>Workshop</i> nasional b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>)	Desember 2011		Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan: ~ Menteri Perindustrian ~ Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ~ Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ~ Kepala Badan Standarisasi Nasional

21) Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 11 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	21) Meningkatkan sistem dan prosedur yang ada dalam rangka memfasilitasi integrasi produksi dan <i>supply chains</i> , yaitu :			Terpenuhinya sebagian komitmen AEC di bidang Kepabeanaan	
	a. Impor sementara	Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyempurnaan prosedur impor sementara.	Desember 2011		Menteri Keuangan
	b. <i>Outward Processing</i> dan <i>Inward Processing</i>	Perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat dan Gudang Berikat	Desember 2011		Menteri Keuangan
	22) Modernisasi Klasifikasi Barang	Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2012	Desember 2011		Menteri Keuangan
	23) Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kepabeanaan	<i>Workshop</i> nasional	September 2011		Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan
3. Komitmen AEC untuk Arus Jasa Secara Bebas	1) Pengesahan <i>ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)</i> Paket 7	Peraturan Presiden tentang Pengesahan AFAS Paket 7	Desember 2011	Pemenuhan komitmen untuk AFAS Paket 7	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: - Sekretaris Kabinet - Menteri Luar Negeri

2) Menambahkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 12 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2) Menambahkan 15 sub sektor baru untuk memenuhi 80 sub sektor AFAS Paket 8	15 sub sektor baru	Agustus 2011	Tercapainya penambahan 15 sub sektor baru untuk memenuhi 80 sub sektor pada AFAS Paket 8	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: ~ Menteri Pekerjaan Umum ~ Menteri Kesehatan ~ Menteri Komunikasi dan Informasi ~ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ~ Menteri Keuangan ~ Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ~ Menteri Perhubungan ~ Menteri Pendidikan Nasional ~ Menteri Pemuda dan Olahraga ~ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ~ Menteri Pertanian ~ Menteri Perindustrian ~ Menteri Kelautan dan Perikanan ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ~ Menteri Lingkungan Hidup ~ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

~ Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 13 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					- Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional - Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	3) Menyusun komitmen Indonesia untuk AFAS Paket 8 pada 4 sektor prioritas (bidang Transportasi Udara, e-ASEAN, Kesehatan dan Pariwisata): a. Liberalisasi hambatan perdagangan jasa dengan penerapan fleksibilitas	Komitmen Indonesia untuk AFAS Paket 8 - <i>Mode 1 : Cross Border Supply</i> (perdagangan lintas batas) Tanpa hambatan - <i>Mode 2 : Consumption Abroad</i> (Konsumsi di Luar Negeri) Tanpa hambatan - <i>Mode 3 : Commercial Presence</i> (Keberadaan Komersial) untuk <i>National Treatment</i> yaitu Penghapusan dengan fleksibilitas	Agustus 2011	Liberalisasi per- dagangan jasa pa- da 4 sektor prio- ritas (bidang Transportasi Udara, e-ASEAN, Kesehatan dan Pariwisata)	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: - Menteri Kesehatan - Menteri Komunikasi dan Informatika - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata - Menteri Perhubungan - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

b. Peningkatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 14 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	b. Peningkatan penyertaan modal asing/ <i>Foreign Equity Participation</i> (FEP) menjadi 70% (tujuh puluh per seratus)	<i>Mode 3 : Commercial Presence</i> (Keberadaan Komersial) untuk <i>Market Access</i> yaitu FEP 70 % (tujuh puluh per seratus) dan penghapusan semua hambatan			
	4) Menyusun komitmen Indonesia untuk AFAS Paket 8 pada sektor logistik dan non prioritas: a. Liberalisasi hambatan perdagangan jasa secara bertahap	Komitmen Indonesia untuk AFAS Paket 8: ~ <i>Mode 1 : Cross Border Supply</i> (perdagangan lintas batas) Tanpa hambatan ~ <i>Mode 2 : Consumption Abroad</i> (Konsumsi di Luar Negeri) Tanpa hambatan ~ <i>Mode 3 : Commercial Presence</i> (Keberadaan Komersial) untuk <i>National Treatment</i> yaitu Penghapusan dengan fleksibilitas	Agustus 2011	Lancarnya arus perdagangan jasa pada sektor logistik dan non prioritas	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: ~ Menteri Pekerjaan Umum ~ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ~ Menteri Keuangan ~ Menteri Perhubungan ~ Menteri Pendidikan Nasional ~ Menteri Pemuda dan Olahraga ~ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ~ Menteri Pertanian ~ Menteri Perindustrian ~ Menteri Kelautan dan Perikanan

b. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 15 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	b. Peningkatan penyertaan modal asing (FEP) menjadi 51% (lima puluh satu per seratus)	<i>Mode 3 : Commercial Presence</i> (Keberadaan Komersial) untuk <i>Market Access</i> yaitu FEP 51% (lima puluh satu per seratus) dan pengurangan semua hambatan secara bertahap			- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral - Menteri Lingkungan Hidup - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal - Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional - Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	5) Pengesahan AFAS Paket 8	Peraturan Presiden tentang Pengesahan AFAS Paket 8	Desember 2011	Pemenuhan komitmen AEC untuk AFAS Paket 8	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: - Menteri Luar Negeri - Sekretaris Kabinet
	6) Pelaksanaan <i>Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineers</i>	a. <i>Workshop</i> nasional b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>).	September 2011 - berlanjut	Terlaksananya <i>MRA on Engineers</i>	Menteri Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan: - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Menteri Perdagangan

7) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 16 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	7) Pelaksanaan <i>Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Architecture</i>	a. <i>Workshop</i> nasional b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>).	September 2011 - berlanjut	Terlaksananya <i>MRA on Architecture</i>	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Pekerjaan Umum ~ Menteri Perdagangan
	8) Negosiasi <i>Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Land Surveying</i>	Ditandatangani <i>MRA on Land Surveying</i>	Desember 2011 - berlanjut	Terpenuhinya <i>MRA on Land Surveying</i>	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Pekerjaan Umum ~ Menteri Perdagangan ~ Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
	9) Pelaksanaan <i>Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Nursing</i>	a. Sosialisasi dan implementasi program kerja Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)	September 2011 - berlanjut	Pemenuhan komitmen AEC untuk <i>MRA on Nursing</i>	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kesehatan ~ Menteri Perdagangan ~ Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
		b. Diseminasi <i>ASEAN Core Competencies</i> Jasa Perawat	September 2011 - berlanjut		

c. Database ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 17 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. <i>Database</i> tenaga kerja perawat asing dari negara ASEAN yang bekerja di Indonesia dan perawat lokal	Desember 2011 - berlanjut		Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kesehatan dan ~ Menteri Perdagangan
		d. <i>Website</i> MRA <i>on Nursing</i> di Indonesia	Desember 2011 - berlanjut		
		e. Penyusunan, implementasi, dan monitoring regulasi MRA <i>on Nursing</i>	Desember 2011 - berlanjut		
	10) <i>Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Medical Practitioners</i>	a. Sosialisasi MRA <i>on Medical Practitioners</i>	September 2011 ~ berlanjut	Pemenuhan komitmen AEC untuk MRA <i>on Medical Practitioners</i>	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kesehatan ~ Menteri Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 18 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Rancangan pengembangan <i>ASEAN Core Competencies</i> Jasa Dokter	Desember 2011 - berlanjut		Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kesehatan ~ Menteri Perdagangan ~ Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
		c. <i>Database</i> dokter asing dari negara ASEAN dan dokter lokal yang bekerja di Indonesia	Desember 2011 - berlanjut		Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kesehatan ~ Menteri Perdagangan
		d. <i>Website MRA on Medical Practitioners</i> di Indonesia	Desember 2011 - berlanjut		Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kesehatan ~ Menteri Perdagangan
	11) Pelaksanaan <i>Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Dental Services</i>	a. Sosialisasi <i>MRA on Dental Services</i>	September 2011 - berlanjut	Pemenuhan komitmen AEC untuk <i>MRA on Dental Services</i>	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kesehatan ~ Menteri Perdagangan

b. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 19 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Pengembangan ASEAN Core Competencies Dokter Gigi	Desember 2011		Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kesehatan ~ Menteri Perdagangan ~ Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
		c. Database dokter gigi asing dari negara ASEAN yang bekerja di Indonesia dan dokter gigi lokal	Desember 2011		Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kesehatan ~ Menteri Perdagangan
		d. Website MRA on Dental Services di Indonesia	Desember 2011		Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kesehatan ~ Menteri Perdagangan
	12) Pelaksanaan <i>Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals</i>	a. Workshop nasional b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>)	September 2011	Pemenuhan komitmen AEC untuk MRA on Tourism Professionals	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan: ~ Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ~ Menteri Perdagangan ~ Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 20 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	13) Menyusun komitmen Indonesia untuk Paket Kelima Jasa Keuangan	Daftar komitmen Indonesia untuk Paket Komitmen Kelima Jasa Keuangan	Desember 2011	Liberalisasi Arus Jasa Keuangan ASEAN	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia
	14) Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kelima Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Bidang Jasa (<i>Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services</i>)	Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services</i>	Desember 2011	Implementasi Paket Komitmen Kelima Jasa Keuangan	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia
	15) Menyepakati ' <i>pre agreed flexibilities</i> ' (<i>safeguard framework</i>)	Daftar <i>pre-agreed flexibilities</i>	Desember 2011	kesepakatan atas daftar ' <i>pre-agreed flexibilities</i> '	Menteri Keuangan
4. Komitmen AEC untuk arus investasi secara bebas	<i>Review</i> terhadap <i>Reservation List ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)</i> -Indonesia:				
	a. di sektor pertanian dan sektor jasa terkait pertanian untuk <i>phase II</i>	<i>Reservation List</i> Indonesia di sektor pertanian periode tahun 2010-2011	September 2011	Tercapainya iklim investasi yang lebih menarik bagi investor	Menteri Pertanian berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

b. di sektor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 21 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	b. di sektor perindustrian dan sektor jasa terkait perindustrian untuk <i>phase</i> II	<i>Reservation List</i> Indonesia di sektor perindustrian periode tahun 2010-2011.	September 2011		Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
	c. di sektor kehutanan dan sektor jasa terkait kehutanan untuk <i>phase</i> II	<i>Reservation List</i> Indonesia di sektor kehutanan periode tahun 2010-2011	September 2011		Menteri Kehutanan berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
	d. di sektor perikanan dan sektor jasa terkait perikanan untuk <i>phase</i> II	<i>Reservation List</i> Indonesia di sektor perikanan periode tahun 2010-2011	September 2011		Menteri Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
	e. di sektor pertambangan dan sektor jasa terkait pertambangan untuk <i>phase</i> II	<i>Reservation List</i> Indonesia di sektor pertambangan periode tahun 2010-2011	September 2011		Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
5. Komitmen AEC untuk arus modal yang lebih bebas	a. Melakukan kajian mengenai identifikasi dan <i>assessment</i> ketentuan liberalisasi aliran modal berkaitan dengan investasi portofolio	<i>Country Report</i> mengenai identifikasi dan <i>assessment</i> ketentuan liberalisasi aliran modal berkaitan dengan investasi portofolio.	September 2011	Tersedianya <i>assessment</i> tahapan liberalisasi aliran modal yang lebih bebas untuk investasi portofolio	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia
	b. Melakukan kajian mengenai identifikasi dan <i>assessment</i> ketentuan liberalisasi aliran modal berkaitan pinjaman luar negeri jangka panjang.	<i>Country report</i> mengenai identifikasi dan <i>assessment</i> ketentuan liberalisasi aliran modal berkaitan pinjaman luar negeri jangka panjang	September 2011	Tersedianya <i>assessment</i> tahapan liberalisasi aliran modal yang lebih bebas untuk pinjaman luar negeri jangka panjang	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 23 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
6. <i>Priority Integration Sectors</i> (PIS)	a. Menyelesaikan komitmen yang telah diidentifikasi berdasarkan <i>roadmap</i> 12 PIS	1. <i>Review</i> dua-tahunan sekali guna memonitor status, kemajuan dan efektivitas dari perkembangan <i>roadmap</i> PIS antara negara anggota ASEAN	September 2011 - berlanjut	Tercapainya <i>review</i> dua-tahunan sekali guna memonitor status, kemajuan dan efektivitas dari perkembangan <i>roadmap</i> PIS antara negara anggota ASEAN	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: ~ Menteri Perindustrian ~ Menteri Perhubungan ~ Menteri Komunikasi dan Informatika ~ Menteri Kesehatan ~ Kementerian Pertanian ~ Kementerian Kehutanan ~ Kementerian Kelautan dan Perikanan ~ Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
		2. Identifikasi proyek-proyek pada spesifik sektor atau inisiatif dengan negara Koordinator PIS melalui dialog atau konsultasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya sektor swasta	Desember 2011	Terlaksananya pengidentifika- sian proyek- proyek pada spesifik sektor	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 24 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		3. Laporan implementasi <i>roadmap</i> dari 12 PIS	Desember 2011	Tercapainya komitmen yang telah diidentifikasi dan disusun berdasarkan <i>roadmap</i> dari 12 PIS	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian
	b. <i>Priority Integration Sectors</i> (Sektor Otomotif): 1) Peninjauan berkala untuk memonitor status, perkembangan dan efektivitas <i>roadmap</i> PIS di sektor otomotif	Laporan peningkatan nilai perdagangan dan investasi di sektor otomotif	September 2011 - berlanjut	Tercapainya integrasi regional melalui liberalisasi, fasilitasi dan promosi untuk menciptakan integrasi penuh di sektor otomotif	Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan
	2) Identifikasi terhadap proyek atau inisiatif spesifik melalui dialog atau konsultasi dengan <i>stakeholder</i> dan sektor swasta di sektor otomotif	Laporan hasil identifikasi peningkatan kemampuan teknologi di sektor otomotif	September 2011 - berlanjut	Meningkatnya kemampuan teknologi dan partisipasi sektor swasta di sektor otomotif	

3) Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 25 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di sektor otomotif	Pelatihan berupa <i>workshop</i> untuk peningkatan keahlian sejumlah sumber daya manusia dalam bidang otomotif	September 2011	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di sektor otomotif	Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan
	4) Meningkatkan standar dan kualitas produk-produk otomotif melalui:				
	a. Pertukaran informasi tentang standar, peraturan, prosedur dan persyaratan wajib di negara anggota ASEAN terkait dengan sektor otomotif	Tersedianya informasi tentang standar, peraturan, prosedur dan persyaratan wajib di setiap negara anggota ASEAN terkait sektor otomotif dalam portal ASEAN yang dapat diakses secara <i>online</i> oleh kalangan umum	Desember 2011	Tercapainya penghapusan hambatan teknis perdagangan yang disebabkan oleh perbedaan standar nasional dan prosedur penilaian kesesuaian di sektor otomotif	
	b. Analisa dan studi banding peraturan antar negara anggota ASEAN	Hasil analisa dan studi banding peraturan antar negara anggota ASEAN dalam sektor otomotif	Desember 2011		
	c. Identifikasi area untuk harmonisasi standar dan MRA	Daftar Harmonisasi standar dan MRA sektor otomotif	September 2011		
	d. Mengembangkan MRA sektoral	Daftar MRA sektor otomotif	September 2011		
	e. Identifikasi kebutuhan infrastruktur teknis	Daftar kebutuhan infrastruktur terkait sektor otomotif	September 2011		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
7. Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan	1. Harmonisasi prosedur karantina dan inspeksi/ <i>sampling</i>	Prosedur karantina dan inspeksi/ <i>sampling</i> nasional yang sejalan dengan peraturan perkarantinaaan dan inspeksi/ <i>sampling</i> kawasan regional dan internasional	Desember 2011	Tercapainya harmonisasi prosedur karantina dan inspeksi/ <i>sampling</i> nasional yang sejalan dengan peraturan perkarantinaaan kawasan regional dan internasional	Menteri Pertanian berkoordinasi dengan: - Menteri Perdagangan - Menteri Kelautan dan Perikanan - Menteri Kehutanan - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
	2. Mengembangkan dan mengimplementasikan <i>Timber Legality Assurance System</i> (TLAS)	Tersedianya dan terimplementasinya TLAS yang diakui pasar internasional	Desember 2011	Tercapainya pelaksanaan tata kelola hutan, penegakan hukum dan promosi perdagangan kayu yang terjamin legalitasnya	Menteri Kehutanan
	3. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian kualitas produk hasil hutan (kayu dan non kayu)	Sistem pengendalian kualitas produk hasil hutan (kayu dan non kayu)	Desember 2011	Tercapainya kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk kehutanan	Menteri Kehutanan berkoordinasi dengan: - Menteri Pertanian - Menteri Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
B. MENUJU WILAYAH EKONOMI YANG BERDAYA SAING TINGGI					
1. Kebijakan Persaingan	Melakukan berbagai kegiatan advokasi dan publikasi untuk mendorong pentingnya kebijakan persaingan di Indonesia	Kegiatan diseminasi Pedoman Regional tentang Kebijakan Persaingan dan Buku Pegangan Regional tentang Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha di ASEAN untuk Pelaku Bisnis (<i>The Regional Guideline on Competition Policy and Law in ASEAN for Businesses</i>)	Agustus 2011	Terciptanya budaya persaingan sehat	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
2. Hak atas Kekayaan Intelektual	Menyusun Rencana Kerja Hak atas Kekayaan Intelektual	a. Formasi jaringan <i>Business Development Services</i> (BDS) Nasional secara <i>online</i> dan <i>link</i> ASEAN	September 2011 - berlanjut	Pemenuhan Komitmen AEC- <i>Blueprint</i> bidang Hak atas Kekayaan Intelektual	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
		b. Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>) dan Penelitian dampak dari penerapan Protokol Madrid			
		c. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
3. Pengembangan Infrastruktur	1) Menyusun <i>Transport Action Plan</i> dan <i>Road Safety Requirement</i>	Implementasi ASEAN <i>five-year Regional Road Safety Action Plan</i> (2010-2011) yang mengacu kepada ASEAN <i>Strategic Transport Plan</i> (ASTP) 2011-2015	Desember 2011	Terpenuhinya komitmen AEC- <i>Blueprint</i> untuk sektor perhubungan dan peningkatan daya saing nasional di bidang infrastruktur yang terkait dengan <i>Road Safety Requirement</i>	Menteri Perhubungan berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum
	2) Melakukan proses ratifikasi dan peningkatan daya saing yang meliputi: a. Melakukan proses pengesahan ASEAN <i>Multilateral Agreement on Air Services</i>	Peraturan Presiden tentang Pengesahan ASEAN <i>Multilateral Agreement on Air Services</i>	September 2011	Terpenuhinya komitmen AEC <i>Blueprint</i> untuk mengesahkan <i>body agreement</i> dan peningkatan daya saing <i>stakeholders</i> penerbangan nasional	Menteri Perhubungan berkoordinasi dengan : - Menteri Luar Negeri - Sekretaris Kabinet
	b. Melakukan proses pengesahan Protokol 1 mengenai <i>Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Region</i>	Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protokol 1 mengenai <i>Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Region</i>	September 2011		

c. Melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 29 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	c. Melakukan proses pengesahan Protokol 2 mengenai <i>Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Regions</i>	Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protokol 2 mengenai <i>Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Regions</i> .	September 2011		
	d. Identifikasi faktor-faktor penghambat daya saing <i>stakeholders</i> penerbangan nasional	Dokumen yang mengidentifikasi faktor-faktor penghambat daya saing <i>stakeholders</i> penerbangan nasional	September 2011		Menteri Perhubungan
	e. Penyusunan <i>roadmap</i> Angkutan Udara menuju AEC 2015	<i>Roadmap</i> Angkutan Udara menuju AEC 2015	September 2011		Menteri Perhubungan
	3) Melakukan pengesahan terhadap Protokol 1 Penunjukan Rute dan Fasilitas Angkutan Transit (<i>Protocol 1 Designation of Transit Transport Routes and Facilities</i>)	Peraturan Presiden mengenai Pengesahan Protokol 1 Penunjukan Rute dan Fasilitas Angkutan Transit (<i>Protocol 1 Designation of Transit Transport Routes and Facilities</i>) sebagai dasar penetapan penunjukan rute ASEAN Highway (AH.150 Indonesia-Entikong dan Malaysia-Tibedu)	Desember 2011	Terpenuhinya komitmen AEC untuk ASEAN Highway	Menteri Perhubungan berkoordinasi dengan ~ Menteri Luar Negeri ~ Sekretaris Kabinet



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 30 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	4) Pembangunan jaringan <i>backbone</i> nasional dengan pita lebar (implementasi PALAPA <i>Ring</i>)	Jaringan <i>backbone</i> nasional dengan pita lebar (implementasi PALAPA <i>Ring</i>)	Desember 2011	Tercapainya Nasional <i>Connectivity</i> dan tersedianya kebutuhan koneksi pita lebar secara nasional untuk menunjang jaringan masa mendatang	Menteri Komunikasi dan Informatika
	5) Memperkuat keamanan informasi dunia <i>cyber</i>	Sistem keamanan informasi dunia <i>cyber</i> nasional	Desember 2011	Tersedianya sistem keamanan informasi dunia <i>cyber</i> nasional yang dapat menunjang kerjasama pertukaran informasi antar daerah, pemerintah, industri dan mitra internasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 31 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	6) Menerbitkan regulasi mengenai <i>interoperability</i> dan interkoneksi yang berbasis <i>Next Generation Networks</i>	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang <i>Next Generation Networks</i>	Desember 2011	Tercapainya Nasional <i>Connectivity</i> dan maksimalnya penggunaan sumber daya terbatas (pita frekuensi)	
	7) Pengembangan (<i>upgrade</i>) program internet pedesaan dengan <i>broadband</i> 512 kpbs	Program Internet pedesaan dengan <i>broadband</i> 512 kpbs	Desember 2011	Terpenuhinya KPI ASEAN ICT <i>Masterplan</i> dan terjembataninya kesenjangan digital	
	8) Pembangunan Indonesia <i>Internet Exchange</i>	Indonesia <i>Internet Exchange</i>	Desember 2011	Tersedianya nasional ' <i>peering platform</i> ' dan tercapainya <i>front liner</i> Indonesia pada ASEAN <i>Internet Exchange</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
4. Perpajakan	Melakukan negosiasi bilateral dengan negara anggota ASEAN yang belum memiliki Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia	Perjanjian Bilateral dengan negara anggota ASEAN terkait persetujuan penghindaran pengenaan pajak berganda dan penghindaran pengelakan pajak pada tahun 2010-2011, sampai perluasan yang memungkinkan	Desember 2011	Terlaksananya Perjanjian Bilateral dengan negara anggota ASEAN terkait persetujuan penghindaran pengenaan pajak berganda dan penghindaran pengelakan pajak	Menteri Keuangan
5. Perdagangan secara elektronik (<i>e-commerce</i>)	Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik	Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik	Desember 2011	Terlaksananya penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Menteri Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 33 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
C. MENUJU KAWASAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG SEIMBANG					
Pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	1) Menerapkan kurikulum umum tentang kewirausahaan	Program Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi	September 2011	Tercapainya percepatan pengembangan UKM dan optimalisasi keragaman ASEAN	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2) Pembentukan Pusat Pelayanan UKM yang terhubung secara regional dan sub-regional dengan negara anggota ASEAN	Pedoman dan terbentuknya Pusat Pelayanan UKM	Desember 2011	Tercapainya peningkatan daya saing dan dinamika UKM ASEAN dengan fasilitasi akses informasi, pasar, pengembangan SDM dan keterampilan maupun teknologi	

3) Pendirian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 34 ~

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3) Pendirian fasilitas keuangan UKM sesuai kebutuhan	Fasilitas keuangan UKM	Desember 2011	Tercapainya UKM yang kuat secara ekonomi makro yang dapat mengatasi permasalahan keuangan dan pesatnya arus liberalisasi perdagangan	
	4) Pengembangan inkubator bisnis dan teknologi untuk pengembangan wirausaha baru inovatif	Inkubator bisnis dan teknologi	September 2011	Meningkatnya jumlah inkubator bisnis dan teknologi yang mampu menumbuhkan wirausaha baru	
	5) Penyediaan dana padanan dan pemanfaatan dana pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai sumber keuangan UKM ASEAN	Komitmen penyediaan dana padanan dalam pembentukan dana pengembangan UKM	Desember 2011	Tercapainya UKM ASEAN yang kuat secara ekonomi dan dapat mengatasi permasalahan keuangan	

6) Melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	6) Melakukan program pengembangan/pelatihan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Program pengembangan/ pelatihan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan rencana usaha (<i>business plan</i>) dalam 2011 sebanyak 5 kali (di 5 kota) dengan peserta Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) masing-masing sebanyak 30 orang per pelatihan	September 2011 - berlanjut	Tercapainya peningkatan pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan <i>business plan</i>	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi Astuti